

Rekonstruksi Peran Komite Sekolah dalam Mendukung Pertumbuhan Petani Milenial : Studi Kasus di SMK-PP Negeri Kupang

Mariyanti Nenohai^{1*}, Hotmaulina Sihotang², Lisa G. Kailola³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia

Corresponding Author's e-mail : mariyanti.nenohai@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juni, 2026

Page: 2453-2468

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.2884>

Article History:

Received: Mei 06, 2026

Revised: Juni 20, 2026

Accepted: Juli 16, 2026

Abstract : Indonesia's farmer regeneration crisis is a challenge threatening food sustainability. The 2023 Agricultural Census shows that older farmers dominate the sector, while youth participation remains low. SMK PP Negeri Kupang has integrated an agricultural curriculum and the Young Agricultural Entrepreneur Development Programme (PWMP) to encourage millennial farmers. However, implementation faces sociocultural barriers, negative perceptions of farming and students' limited access to family land. This study analyses the School Committee's role and reconstructs it as a social engineering agent connecting schools, families, and communities. Using a qualitative case-study design, the research was conducted at SMK PP Negeri Kupang. Findings show that the Committee's role remains limited to communication, problem-solving, and financial support. Based on Joyce Epstein's partnership model, the Committee is repositioned as a parenting agent that promotes agriculture and facilitates land use for student practice. This reconstruction can strengthen PWMP effectiveness and accelerate millennial farmer regeneration in East Nusa Tenggara.

Keywords : School Committee, Millennial Farmers, Social Engineering, Parent Partnership, SMK PP Negeri Kupang, Epstein Model.

Abstrak : Krisis regenerasi petani di Indonesia merupakan tantangan struktural yang mengancam keberlanjutan pangan. Sensus Pertanian 2023 menunjukkan dominasi petani berusia lanjut, sementara keterlibatan generasi muda rendah. SMK PP Negeri Kupang telah mengintegrasikan kurikulum pertanian dan Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) untuk mendorong lahirnya petani milenial. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan sosiokultural, terutama stigma negatif terhadap profesi petani dan terbatasnya akses siswa terhadap lahan keluarga. Penelitian ini menganalisis peran Komite Sekolah dan merumuskan rekonstruksinya sebagai agen rekayasa sosial yang menjembatani sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di SMK PP Negeri Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komite Sekolah masih terbatas pada komunikasi, penyelesaian masalah, dan dukungan pendanaan. Berdasarkan model kemitraan Joyce Epstein, Komite Sekolah direposisi sebagai agen pengasuhan yang menyosialisasikan prospek pertanian dan memfasilitasi pemanfaatan lahan keluarga sebagai media praktik siswa. Rekonstruksi ini dapat memperkuat efektivitas PWMP dan

mempercepat regenerasi petani milenial di Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci : Komite Sekolah, Petani Milenial, Rekayasa Sosial, Kemitraan Orang Tua, SMK PP Negeri Kupang, Model Epstein.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar strategis perekonomian Indonesia karena berperan dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekonomi perdesaan, dan pemeliharaan ketahanan pangan nasional. Keberlanjutan pembangunan pertanian modern sangat bergantung pada tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, kemampuan kewirausahaan, kapasitas inovasi, dan kesiapan mengadopsi teknologi. Regenerasi petani karena itu tidak cukup hanya dipahami sebagai pergantian kelompok usia, tetapi juga sebagai proses membentuk generasi pelaku pertanian yang produktif, adaptif, dan mampu mengembangkan model usaha agribisnis sesuai perubahan pasar dan teknologi (Ani et al., 2024; Haryati et al., 2024; Lone & Baba, 2024). Orientasi kewirausahaan, jaringan informasi, dukungan sosial, dan penguasaan teknologi terbukti berperan dalam meningkatkan kapasitas generasi muda untuk bertahan dan mengembangkan usaha di sektor pertanian (Kusnandar et al., 2024; Qonita et al., 2025).

Meskipun demikian, komposisi usia pelaku pertanian di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Hasil Sensus Pertanian 2023 memperlihatkan bahwa pengelolaan usaha pertanian perorangan masih didominasi oleh generasi berusia relatif tua. Distribusi pengelola usaha pertanian perorangan menurut generasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Pengelola Unit Usaha Pertanian Menurut Generasi dan Kelompok Usia

Nama generasi	Rentang usia (tahun)	Persentase pengelola usaha pertanian (%)
Generasi X	43–58	42,39
<i>Baby boomer</i>	59–77	27,61
Milenial	19–39	25,61
<i>Pre-boomer</i>	>77	2,24
Generasi Z	<19	2,14

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023).

Data tersebut menunjukkan bahwa 72,24% pengelola usaha pertanian berasal dari Generasi X, *baby boomer*, dan *pre-boomer*, sedangkan proporsi generasi milenial dan Generasi Z secara kumulatif hanya mencapai 27,75%. Pada saat yang sama, jumlah usaha pertanian perorangan mengalami penurunan sebesar 7,42%, dari sekitar 31,70 juta unit pada 2013 menjadi 29,36 juta unit pada 2023 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan demografis yang dapat mengganggu kesinambungan produksi pangan apabila tidak diimbangi dengan proses regenerasi yang sistematis. Data nasional BPS juga menunjukkan bahwa jumlah petani milenial berusia 19–39 tahun pada 2023 mencapai sekitar 6,18 juta orang atau 21,93% dari keseluruhan petani yang tercatat.

Rendahnya keterlibatan generasi muda tidak hanya disebabkan oleh persoalan demografis, tetapi juga berkaitan dengan citra pekerjaan pertanian, tingkat pendapatan, akses terhadap lahan, dukungan keluarga, peluang kerja di luar pertanian, dan proses urbanisasi. Pertanian masih kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan yang kurang modern, membutuhkan tenaga fisik yang besar, memiliki pendapatan tidak pasti, dan menawarkan mobilitas sosial yang lebih rendah dibandingkan pekerjaan di perkotaan. Persepsi tersebut dapat menurunkan minat generasi muda untuk memilih pendidikan dan karier pertanian meskipun mereka berasal dari keluarga petani (Haryati et al., 2024; Prasetyaningrum et al., 2022). Keputusan generasi muda untuk tetap berada di sektor pertanian juga dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, akses modal, dukungan orang tua, keberlanjutan usaha keluarga, lingkungan sosial, dan prospek pendapatan jangka panjang (Ayyıldız et al., 2025; Nandi et al., 2022).

Regenerasi petani memerlukan lingkungan yang memungkinkan generasi muda memperoleh pengalaman usaha, akses terhadap sumber daya produksi, dukungan sosial, dan pengakuan atas pertanian sebagai profesi yang prospektif. Penelitian menunjukkan bahwa minat pemuda untuk melanjutkan usaha pertanian keluarga meningkat ketika mereka memperoleh akses teknologi, pengalaman praktik, dukungan penyuluh, jaringan pasar, dan kesempatan mengelola usaha secara mandiri (Ardyanti et al., 2024; Effendy et al., 2022). Dukungan lingkungan sosial juga berperan dalam pembentukan perilaku kewirausahaan petani milenial, meskipun pengaruh setiap aktor orang tua, teman, penyuluh, media, dan organisasi pertanian dapat berbeda menurut kondisi wilayah dan karakteristik pemuda (Qonita et al., 2025).

Persoalan regenerasi petani menjadi semakin relevan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang perekonomiannya masih sangat bergantung pada pertanian dan peternakan. Hasil Sensus Pertanian 2023 mencatat sebanyak 873.096 rumah tangga usaha pertanian dan 901.801 usaha pertanian perorangan di NTT. Selain itu, terdapat 536 usaha pertanian lainnya dan 48 perusahaan pertanian berbadan hukum sehingga jumlah keseluruhan unit usaha pertanian mencapai 902.385 unit (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023). Besarnya jumlah tersebut menunjukkan posisi penting pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat. Namun, sektor ini juga berhadapan dengan keterbatasan modal, infrastruktur, akses pasar, perubahan iklim, kemiskinan perdesaan, serta rendahnya keterlibatan generasi muda. Oleh karena itu, penumbuhan wirausahawan muda pertanian menjadi salah satu kebutuhan strategis untuk mendukung ketahanan pangan, memperkuat ekonomi perdesaan, dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian di NTT.

Pendidikan vokasi pertanian memiliki posisi penting dalam menjawab persoalan tersebut karena dapat menghubungkan pengetahuan teknis, pengalaman praktik, penggunaan teknologi, dan pembentukan kompetensi kewirausahaan. Pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dapat memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan sektor pertanian modern (Putranto et al., 2024). Pendidikan kewirausahaan juga terbukti dapat meningkatkan intensi berwirausaha, efikasi diri, kemampuan mengenali peluang, dan kesiapan peserta didik untuk membangun usaha setelah menyelesaikan pendidikan (Bahaw et al., 2024; Nguyen & Nguyen, 2024). Dalam konteks pertanian, kurikulum kewirausahaan perlu mengintegrasikan kompetensi produksi, manajemen usaha, literasi keuangan, penggunaan teknologi, pemasaran, dan pengembangan jaringan agribisnis (Okello et al., 2024).

Salah satu lembaga yang memiliki mandat tersebut adalah Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kupang atau SMK PP Negeri Kupang. Lembaga pendidikan vokasi ini menyelenggarakan sejumlah program keahlian pertanian, antara lain Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Ternak Ruminansia, serta bidang kesehatan dan perawatan hewan. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk lulusan yang kompeten, mandiri, dan mampu berwirausaha di sektor pertanian. Sekolah juga memperoleh dukungan Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) dari Kementerian Pertanian sebagai sarana pengembangan usaha rintisan bagi siswa dan alumni (SMK PP Negeri Kupang, 2020). Program tersebut penting karena dukungan usaha awal, pendampingan, jaringan, dan akses pembiayaan dapat meningkatkan kapasitas generasi muda untuk mengembangkan inovasi dan memasuki sektor pertanian secara berkelanjutan (Carbone et al., 2024; Figurek et al., 2024; Licciardo et al., 2024).

Namun, keberhasilan kurikulum kewirausahaan pertanian dan program PWMP tidak hanya ditentukan oleh sekolah. Dukungan keluarga memengaruhi pilihan pendidikan, orientasi karier, keberanian berwirausaha, dan keputusan generasi muda untuk meneruskan usaha pertanian. Aspirasi orang tua yang lebih mengutamakan pekerjaan formal di luar pertanian dapat mengurangi keinginan anak untuk memilih pertanian sebagai profesi, terutama ketika pertanian dipersepsikan sebagai pekerjaan berisiko dan berstatus sosial rendah (Nandi et al., 2022; Rahaman et al., 2023). Sebaliknya, dukungan karier dari orang tua dapat meningkatkan perilaku proaktif, kepercayaan diri, dan kesiapan peserta didik dalam merencanakan masa depan pekerjaannya (Wang et al., 2024).

Temuan awal yang menjadi dasar penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian orang tua siswa SMK PP Negeri Kupang masih memiliki persepsi negatif terhadap profesi petani. Pertanian dipandang sebagai pekerjaan yang kotor, berpenghasilan rendah, tidak pasti, dan kurang memberikan prestise sosial. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian orang tua lebih mengarahkan anak untuk mencari pekerjaan kantoran atau bekerja di kota setelah lulus. Selain itu, siswa menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan keluarga yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai media praktik, pengembangan proyek PWMP, atau perintisan usaha pertanian mandiri. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap aset keluarga tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan orang tua terhadap kapasitas dan prospek karier anak di sektor pertanian.

Kesenjangan antara visi inovasi sekolah dan persepsi keluarga menunjukkan pentingnya kemitraan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keterlibatan orang tua yang efektif tidak terbatas pada pemberian dana atau kehadiran dalam pertemuan sekolah, tetapi mencakup dukungan terhadap proses belajar, komunikasi dua arah, pengambilan keputusan, pendampingan karier, dan penyediaan sumber daya yang menunjang perkembangan siswa (Addi & Raccah, 2024; Wang et al., 2024). Kualitas keterlibatan tersebut juga dipengaruhi oleh akses informasi dan kemampuan sekolah dalam membangun komunikasi yang sesuai dengan karakteristik sosial orang tua.

Dalam sistem pendidikan Indonesia, Komite Sekolah mempunyai kedudukan sebagai lembaga mandiri yang berfungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan berdasarkan prinsip gotong royong, demokratis, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Namun, peran Komite Sekolah di SMK PP Negeri Kupang selama ini cenderung berpusat pada penyampaian informasi, penyelesaian persoalan antara sekolah dan orang tua, serta dukungan pendanaan untuk kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat dibiayai sekolah. Peran tersebut belum diarahkan secara optimal pada substansi pendidikan pertanian, perubahan persepsi keluarga, pendampingan karier, dan pemanfaatan aset keluarga untuk mendukung pembelajaran siswa.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi peran Komite Sekolah dari sekadar penghubung administratif menjadi agen rekayasa sosial yang aktif membangun perubahan cara pandang keluarga terhadap pertanian modern. Rekonstruksi ini dapat dikembangkan menggunakan enam dimensi kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat dari Epstein, yaitu *parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision making, dan collaborating with community* (Epstein et al., 2019). Melalui kerangka tersebut, Komite Sekolah dapat berperan sebagai agen pengasuhan yang memperkenalkan prospek agribisnis modern, fasilitator komunikasi dua arah, penghubung dengan praktisi dan lembaga pembiayaan, serta mediator penyelarasan aset keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan atau lahan tidur sebagai tempat praktik siswa.

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas minat pemuda terhadap pertanian, kewirausahaan petani milenial, dukungan sosial, sukseksi usaha keluarga, pendidikan kewirausahaan, dan kebijakan petani muda (Ani et al., 2024; Ayyıldız et al., 2025; Bahaw et al., 2024; Carbone et al., 2024; Haryati et al., 2024; Qonita et al., 2025). Namun, kajian yang secara khusus menempatkan Komite Sekolah sebagai agen perubahan sosial untuk menyelaraskan inovasi pendidikan vokasi pertanian dengan persepsi dan aset keluarga masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi fungsi Komite Sekolah menjadi *parenting agent* dan fasilitator *family asset alignment* dalam mendukung pelaksanaan PWMP dan regenerasi petani milenial. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran aktual Komite Sekolah, mengidentifikasi hambatan sosiokultural dalam keterlibatan orang tua, serta merumuskan rekonstruksi peran Komite Sekolah di SMK PP Negeri Kupang sebagai agen rekayasa sosial. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat; meningkatkan efektivitas program PWMP; serta mendukung proses regenerasi petani milenial yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan mendalam mengenai peran Komite Sekolah dalam

mendukung regenerasi petani milenial melalui Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP). Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara intensif suatu fenomena dalam konteks kelembagaan dan sosial yang nyata (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan di SMK PP Negeri Kupang pada [bulan dan tahun penelitian]. Unit analisis penelitian mencakup peran, pola kemitraan, dan bentuk keterlibatan Komite Sekolah dalam menghubungkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan pendidikan serta pelaksanaan PWMP, meliputi pengurus Komite Sekolah, pimpinan sekolah, guru, orang tua siswa, siswa, alumni, dan pihak lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai kejenuhan, yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi atau kategori substantif yang baru (Hennink & Kaiser, 2022). Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah, pemetaan pemangku kepentingan, penentuan informan, pengumpulan data lapangan, pemeriksaan keabsahan data, analisis, serta perumusan rekonstruksi peran Komite Sekolah berdasarkan enam dimensi kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat, yaitu *parenting*, *communicating*, *volunteering*, *learning at home*, *decision making*, dan *collaborating with community* (Epstein et al., 2019).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semiterstruktur, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi dari beragam sumber dan memperkuat pemahaman terhadap konteks penelitian (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semiterstruktur, lembar observasi, format telaah dokumen, catatan lapangan, dan alat perekam. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, hambatan sosiokultural, bentuk dukungan keluarga, serta pelaksanaan PWMP. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi praktik kemitraan dan aktivitas kewirausahaan pertanian, sedangkan studi dokumentasi mencakup program kerja Komite Sekolah, dokumen kurikulum, laporan PWMP, notula rapat, dan dokumen kelembagaan lainnya. Data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, pengodean, pengelompokan kategori, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Pengodean dilakukan secara deduktif berdasarkan enam dimensi kemitraan Epstein dan secara induktif untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data lapangan. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Carter et al., 2014). Konfirmasi interpretasi juga dilakukan kepada informan kunci melalui *member checking* terstruktur untuk memastikan bahwa hasil analisis sesuai dengan pengalaman dan konteks yang disampaikan oleh informan (McKim, 2023). Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kondisi aktual peran Komite Sekolah dan merumuskan rekonstruksinya sebagai agen rekayasa sosial, agen pengasuhan, serta fasilitator penyaluran aset keluarga dalam mendukung efektivitas PWMP dan regenerasi petani milenial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Demografis dan Stigma Agraria di Nusa Tenggara Timur

Kondisi empiris sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur memperlihatkan struktur usaha yang sangat bergantung pada rumah tangga dan pelaku pertanian perorangan. Hasil Sensus Pertanian 2023 mencatat bahwa dari 902.385 unit usaha pertanian di NTT, sebanyak 901.801 unit merupakan Usaha Pertanian Perorangan (UTP), sedangkan Usaha Pertanian Lainnya (UTL) dan Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum masing-masing hanya berjumlah 536 dan 48 unit. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas pertanian di NTT dikelola oleh individu atau keluarga, bukan oleh perusahaan pertanian berskala besar.

Tabel 2. Distribusi Unit Usaha Pertanian Menurut Kategori Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kategori usaha pertanian di NTT	Jumlah unit usaha	Persentase terhadap total (%)
Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	901.801	99,94
Usaha Pertanian Lainnya (UTL)	536	0,06
Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum	48	<0,01
Total unit usaha pertanian	902.385	100,00

Sumber: Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023, diolah.

Dominasi UTP menunjukkan bahwa keluarga merupakan aktor utama dalam penguasaan lahan, pengambilan keputusan produksi, pewarisan pengetahuan pertanian, dan penentuan akses generasi muda terhadap aset produktif. Dalam konteks tersebut, keputusan lulusan pendidikan vokasi pertanian untuk bekerja atau berwirausaha di sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis yang diperoleh di sekolah. Keputusan tersebut juga bergantung pada persetujuan keluarga, ketersediaan lahan, dukungan modal, pembagian kewenangan pengelolaan aset, serta pandangan keluarga terhadap kelayakan pertanian sebagai pilihan karier. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian orang tua siswa masih menempatkan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah, anggota TNI atau Polri, dan karyawan swasta sebagai simbol keberhasilan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan pertanian. Dalam pandangan tersebut, anak yang kembali ke desa dan mengelola lahan setelah menyelesaikan pendidikan menengah dipersepsikan belum berhasil memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan. Pendidikan di sekolah pertanian kemudian cenderung dimaknai sebagai sarana memperoleh ijazah dan akses terhadap pekerjaan formal, bukan sebagai proses membangun kemampuan mengelola usaha agribisnis secara mandiri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa stigma terhadap profesi petani tidak hanya berhubungan dengan rendahnya pendapatan. Stigma juga berkaitan dengan status sosial, kepastian pekerjaan, kondisi kerja, risiko kegagalan usaha, dan harapan keluarga terhadap mobilitas sosial anak. Temuan ini sejalan dengan Griffin *et al.* (2024), yang menemukan bahwa aspirasi pemuda perdesaan Indonesia semakin diarahkan pada pekerjaan bergaji, stabil, dan diasosiasikan dengan kehidupan modern. Keinginan meninggalkan pertanian tidak selalu muncul karena pemuda kehilangan keterikatan dengan desa, tetapi karena pertanian dipandang belum menyediakan pendapatan, keamanan kerja, dan status sosial yang setara dengan pekerjaan formal.

Ngadi *et al.* (2023) juga menjelaskan bahwa rendahnya keterlibatan pemuda dalam pertanian Indonesia berkaitan dengan meningkatnya mobilitas keluar desa, terbatasnya insentif ekonomi, dan menurunnya daya tarik pekerjaan pertanian. Temuan penelitian di SMK PP Negeri Kupang memperluas penjelasan tersebut dengan menunjukkan bahwa pilihan generasi muda juga dibentuk oleh legitimasi keluarga. Siswa dapat memiliki kompetensi dan ketertarikan terhadap pertanian, tetapi pilihan tersebut sulit direalisasikan apabila orang tua belum menganggap pertanian sebagai pekerjaan yang layak dan tidak memberikan akses terhadap aset keluarga.

Kekhawatiran orang tua tidak sepenuhnya bersifat irasional. Pertanian di NTT berhadapan dengan iklim yang relatif kering, keterbatasan air, fluktuasi harga, keterbatasan infrastruktur, serta ketidakpastian hasil produksi. Touch *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kerentanan petani kecil tidak hanya bersumber dari perubahan iklim, tetapi juga dari keterbatasan modal, teknologi, informasi, akses pasar, dan layanan pendukung. Oleh karena itu, perubahan stigma tidak cukup dilakukan melalui penyampaian bahwa pertanian dapat menghasilkan pendapatan. Sekolah juga perlu menunjukkan bahwa siswa memiliki keterampilan untuk mengelola risiko produksi, keuangan, teknologi, dan pemasaran.

Perkembangan teknologi pertanian di NTT sebenarnya menunjukkan bahwa keterbatasan ekologis dapat direspons melalui inovasi. Penerapan sistem irigasi tetes dan pemantauan berbasis digital di lahan kering, misalnya, memungkinkan penggunaan air dan tenaga kerja yang lebih efisien. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pertanian modern tidak selalu identik dengan pekerjaan manual dan subsisten, tetapi dapat dikembangkan sebagai kegiatan berbasis teknologi, pengetahuan, dan kewirausahaan.

Temuan ini menegaskan bahwa hambatan regenerasi petani di NTT merupakan persoalan multidimensional. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan struktural berupa lahan, modal, air, dan pasar, sekaligus hambatan sosiokultural berupa stigma, rendahnya prestise pekerjaan pertanian, dan ketidakpercayaan keluarga terhadap kemampuan generasi muda. Mdoda *et al.* (2026) menegaskan bahwa dukungan terhadap agripreneur muda harus disesuaikan dengan motivasi, pengalaman, dan hambatan struktural yang dihadapi pemuda. Program yang hanya

menyediakan pelatihan atau bantuan jangka pendek belum memadai apabila persoalan lahan, pembiayaan, pendampingan, dan legitimasi sosial tidak diselesaikan secara bersamaan.

Analisis Hambatan Peran Komite Sekolah Eksisting

Hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen menunjukkan bahwa Komite Sekolah di SMK PP Negeri Kupang telah berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan orang tua. Komite terlibat dalam penyampaian informasi, pemberian pertimbangan terhadap kegiatan sekolah, penyelesaian persoalan siswa, dan dukungan terhadap kegiatan pendidikan yang tidak seluruhnya dapat dibiayai oleh anggaran sekolah. Akan tetapi, keterlibatan tersebut masih lebih banyak berpusat pada aspek administratif, penyelesaian masalah, dan pendanaan.

Komunikasi antara sekolah, komite, dan orang tua biasanya meningkat ketika terdapat kebutuhan sumbangan sukarela, pelaksanaan kegiatan sekolah, atau persoalan kedisiplinan siswa. Sebaliknya, komunikasi mengenai kemajuan kompetensi siswa, prospek karier pertanian, pengembangan proposal PWMP, strategi usaha, penggunaan lahan keluarga, dan keberlanjutan usaha setelah kelulusan belum dilakukan secara terstruktur. Kondisi ini menyebabkan komite belum sepenuhnya berfungsi sebagai penghubung antara inovasi kurikulum pertanian di sekolah dan realitas sosial-ekonomi siswa di lingkungan keluarga.

Keterbatasan tersebut dapat dipahami dari perkembangan regulasi Komite Sekolah. Perubahan dari Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 menuju Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 telah memperkuat kedudukan komite sebagai lembaga mandiri yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Namun, perubahan formal tersebut belum selalu diikuti oleh perluasan praktik kelembagaan di tingkat sekolah.

Tabel 3. Perbandingan Kedudukan, Fungsi, Pengawasan, dan Keanggotaan Komite Sekolah Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016

Parameter perbandingan	Regulasi lama: Kepmendiknas Nomor 044/U/2002	Regulasi baru: Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
Status kelembagaan	Badan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan	Lembaga mandiri yang menjalankan fungsi peningkatan mutu pelayanan pendidikan berdasarkan prinsip gotong royong
Fokus kegiatan	Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan, yang dalam praktiknya sering dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan pembedaan tegas antara bantuan, sumbangan, dan pungutan
Pengawasan keuangan	Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban belum diatur secara terperinci	Penggalangan dana harus berdasarkan proposal, menggunakan rekening bersama, dan dilaporkan secara transparan
Keanggotaan	Memberikan ruang yang relatif luas bagi unsur masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan	Memberikan pembatasan terhadap keterlibatan pendidik, tenaga kependidikan, aparatur pemerintahan tertentu, dan pejabat politik

Sumber: Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, diolah.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat regulatif dan praktik aktual. Komite secara formal mempunyai ruang untuk memberikan pertimbangan, mengawasi pelayanan pendidikan, dan menggalang dukungan masyarakat, tetapi peran tersebut belum dikembangkan ke dalam aktivitas yang berhubungan langsung dengan substansi pendidikan vokasi pertanian. Komite belum secara rutin membahas hambatan pelaksanaan PWMP, kesesuaian program dengan kebutuhan keluarga, akses siswa terhadap aset produktif, dan prospek lulusan di sektor agribisnis. Kondisi tersebut bukan berarti Komite Sekolah tidak menjalankan fungsinya, melainkan menunjukkan bahwa implementasi perannya masih berada pada tingkat keterlibatan

administratif. Antony-Newman (2024) membedakan keterlibatan orang tua dalam urusan sekolah dengan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Keterlibatan administratif biasanya berbentuk kehadiran dalam rapat, pemberian dana, dan penerimaan informasi, sedangkan keterlibatan pendidikan mencakup dukungan terhadap pembelajaran, pembentukan aspirasi, perencanaan karier, dan pemanfaatan sumber daya keluarga.

Perbedaan tersebut relevan dengan kondisi SMK PP Negeri Kupang. Orang tua telah dilibatkan dalam urusan sekolah, tetapi belum secara konsisten ditempatkan sebagai mitra dalam pembentukan kompetensi kewirausahaan dan karier pertanian siswa. Akibatnya, sekolah dapat mengajarkan teknologi pertanian modern dan kewirausahaan, tetapi pesan tersebut tidak selalu memperoleh penguatan ketika siswa kembali ke lingkungan keluarga. Belando-Montoro et al. (2025) menunjukkan bahwa pilihan terhadap pendidikan vokasi dan karier dipengaruhi secara bersamaan oleh faktor personal, akademik, keluarga, dan sosial-ekonomi. Dengan demikian, efektivitas pendidikan vokasi tidak dapat hanya diukur melalui kelengkapan kurikulum dan fasilitas sekolah. Keberhasilannya juga ditentukan oleh sejauh mana keluarga memahami orientasi pendidikan dan mendukung penerapan kompetensi yang diperoleh siswa.

Keterlibatan keluarga juga harus menghasilkan pengalaman pendidikan yang bermakna bagi siswa. Martinez-Yarza et al. (2024) menemukan bahwa pengaruh keterlibatan keluarga terhadap perkembangan sosial-emosional siswa berlangsung melalui peningkatan keterikatan siswa terhadap sekolah dan pembelajaran. Dalam konteks penelitian ini, dukungan orang tua terhadap kegiatan agribisnis dapat meningkatkan rasa percaya diri, ketekunan, dan keberanian siswa dalam menjalankan usaha apabila dukungan tersebut dihubungkan dengan kegiatan belajar dan praktik yang nyata. Komunikasi yang masih bersifat satu arah juga menyebabkan sekolah belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kekhawatiran dan keterbatasan keluarga. Orang tua mungkin tidak menolak pertanian secara mutlak, tetapi merasa khawatir terhadap risiko modal, kegagalan panen, ketersediaan pasar, dan kemampuan anak dalam mengelola usaha. Oleh karena itu, forum komunikasi perlu mengubah pola penyampaian informasi menjadi proses dialog yang memungkinkan sekolah memahami alasan keberatan orang tua sekaligus memberikan penjelasan berbasis rencana usaha dan mekanisme pendampingan.

Rekonstruksi Peran Komite Sekolah Melalui Pendekatan Enam Pilar Joyce Epstein

Berdasarkan temuan mengenai stigma profesi petani, keterbatasan akses terhadap lahan keluarga, dan sempitnya lingkup peran komite, penelitian ini merumuskan rekonstruksi peran Komite Sekolah melalui enam dimensi kemitraan yang telah dijelaskan pada kerangka teoretis. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi sekolah atau keluarga, tetapi memperkuat posisi komite sebagai lembaga perantara yang mampu menghubungkan kebijakan pendidikan, proses pembelajaran, aspirasi siswa, sumber daya keluarga, dan dukungan masyarakat.

Tabel 4. Rekonstruksi Peran Komite Sekolah di SMK PP Negeri Kupang Berdasarkan Enam Dimensi Kemitraan Joyce Epstein

Dimensi kemitraan Epstein	Fokus implementasi teoretis	Aplikasi rekonstruksi peran Komite di SMK PP Negeri Kupang
Parenting (pengasuhan)	Membantu keluarga menciptakan lingkungan rumah yang mendukung perkembangan dan pendidikan anak	Bertindak sebagai parenting agent yang menyelenggarakan edukasi mengenai prospek agribisnis modern dan mengurangi stigma negatif terhadap pertanian
Communicating (komunikasi)	Membangun komunikasi dua arah antara sekolah dan keluarga	Menyelenggarakan forum rutin untuk menyampaikan perkembangan kompetensi, usaha, dan rencana karier pertanian siswa
Volunteering (kesukarelawanan)	Melibatkan orang tua dalam aktivitas sekolah dan pembelajaran siswa	Melibatkan orang tua dalam pameran hasil praktik, pemasaran produk, dan transfer pengetahuan pertanian lokal

Learning at home (belajar di rumah)	Menghubungkan pembelajaran sekolah dengan aktivitas pendidikan di rumah	Memfasilitasi family asset alignment melalui penggunaan pekarangan atau lahan keluarga sebagai media praktik mandiri
Decision making (pengambilan keputusan)	Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam tata kelola serta pengembangan program sekolah	Memperkuat keterlibatan praktisi agribisnis, alumni, penyuluh, dan tokoh masyarakat dalam pemberian pertimbangan program
Collaborating with community (kolaborasi dengan masyarakat)	Mengintegrasikan sumber daya sekolah dengan lembaga dan komunitas eksternal	Membangun jaringan dengan lembaga pembiayaan, koperasi, dunia usaha, penyuluh, dan instansi pertanian

Sumber: Hasil analisis penelitian.

Pada dimensi *parenting*, Komite Sekolah direkonstruksi sebagai agen pengasuhan yang membantu keluarga memahami perubahan karakter pekerjaan pertanian. Kegiatan dapat dilaksanakan melalui lokakarya, pertemuan dengan alumni, kunjungan usaha, konsultasi karier, dan penyampaian perkembangan proyek siswa. Tujuannya bukan sekadar meyakinkan orang tua bahwa pertanian menguntungkan, melainkan memberikan pemahaman yang realistis mengenai peluang, risiko, kebutuhan kompetensi, teknologi, dan pola pengelolaan agribisnis modern. Pada dimensi *communicating*, komite perlu mengembangkan komunikasi yang terjadwal dan dua arah. Informasi yang disampaikan tidak hanya berupa kebutuhan sekolah, tetapi juga perkembangan keterampilan siswa, penggunaan alat dan teknologi, hasil praktik, proposal PWMP, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran. Orang tua pada saat yang sama diberikan ruang untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai modal, penggunaan lahan, pembagian waktu, risiko kerugian, dan keberlanjutan pendidikan anak.

Pada dimensi *volunteering*, orang tua ditempatkan sebagai pemilik pengetahuan dan pengalaman, bukan hanya sebagai penyandang dana. Pengetahuan mengenai musim, benih lokal, pengelolaan ternak, penyimpanan hasil, dan strategi menghadapi kekeringan dapat diintegrasikan dengan pengetahuan teknis yang dipelajari siswa di sekolah. Pendekatan tersebut menciptakan kemitraan yang lebih setara karena sekolah mengakui pengalaman keluarga, sedangkan keluarga memperoleh kesempatan untuk mengamati perkembangan kemampuan siswa. Pada dimensi *learning at home*, penelitian ini menawarkan konsep *family asset alignment* atau penyelarasan aset keluarga. Konsep tersebut merujuk pada proses menghubungkan aset yang dimiliki keluarga seperti lahan pekarangan, lahan kering, kandang, peralatan, jaringan pemasaran, dan pengalaman bertani dengan kebutuhan praktik dan pengembangan usaha siswa. Penyelarasan aset tidak berarti pengalihan kepemilikan, tetapi pemberian akses terbatas berdasarkan kesepakatan mengenai luas lahan, jangka waktu, tanggung jawab pengelolaan, risiko, dan pembagian hasil.

Konsep ini penting karena kepemilikan lahan oleh keluarga tidak secara otomatis memberikan akses kepada generasi muda. Parry et al. (2025) menunjukkan bahwa transfer akses terhadap lahan dipengaruhi oleh kepercayaan antargenerasi, kebutuhan ekonomi keluarga, aturan penguasaan lahan, dan kekhawatiran orang tua terhadap kemampuan anak dalam mengelola aset. Mediasi kelembagaan dapat membantu keluarga membedakan antara penyerahan lahan secara permanen dan pemberian ruang belajar yang terukur. Girard (2023) juga menjelaskan bahwa transisi pemuda menuju pertanian dipengaruhi oleh akses terhadap lahan, modal, pengetahuan, peralatan, dan institusi pasar. Pendidikan yang hanya meningkatkan keterampilan tanpa menyediakan akses terhadap aset produktif berpotensi menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi tidak memiliki ruang untuk memulai usaha. Sementara itu, Jeanneaux et al. (2025) menunjukkan bahwa biaya awal pendirian usaha menjadi hambatan penting bagi petani muda. Pemanfaatan aset keluarga dapat menurunkan biaya tersebut, meskipun tetap harus didukung oleh perencanaan, pendampingan, dan pengelolaan risiko.

Pada dimensi *decision making*, komite dapat memperkuat keterlibatan unsur yang memiliki pengetahuan relevan dengan pengembangan agribisnis, sepanjang sesuai dengan regulasi keanggotaan. Praktisi pertanian, alumni, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha dapat memberikan

pertimbangan terhadap kesesuaian kurikulum, teknologi, peluang komoditas, dan kebutuhan pasar. Kehadiran unsur tersebut membantu memastikan bahwa program kewirausahaan siswa tidak hanya bersifat akademik, tetapi memiliki hubungan dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Pada dimensi *collaborating with community*, komite berfungsi menghubungkan sekolah dengan lembaga pembiayaan, koperasi, penyuluh, dinas pertanian, pasar, dan pelaku usaha. Peran tersebut penting karena siswa dan alumni tidak dapat mengembangkan usaha hanya dengan mengandalkan dukungan sekolah. Mereka memerlukan ekosistem yang menyediakan modal, pendampingan, informasi teknologi, legalitas, pengolahan produk, dan akses pasar.

Rekonstruksi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk inovasi sosial karena menghasilkan tata hubungan baru antara sekolah, keluarga, siswa, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan regenerasi petani. Deže et al. (2023) menegaskan bahwa inovasi sosial dalam pertanian muncul ketika masyarakat membangun cara baru dalam mengorganisasikan pengetahuan, kerja sama, dan sumber daya untuk menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Chatzichristos dan Hennebry (2023) menunjukkan bahwa inovasi sosial perdesaan memerlukan tata kelola multipihak, pembagian peran yang jelas, dan keterlibatan aktif aktor lokal. Steiner et al. (2023) juga menekankan bahwa keberhasilan inovasi sosial dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas aktor, jaringan kelembagaan, dan kemampuan menghubungkan kebutuhan lokal dengan sumber daya eksternal. Dalam model penelitian ini, Komite Sekolah menjadi aktor penghubung pada tingkat menengah yang menerjemahkan visi sekolah ke dalam dukungan konkret keluarga dan masyarakat.

Sinergi Komite Sekolah dalam Menyukseskan Program PWMP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dana stimulan dalam Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian belum secara otomatis menghasilkan keberanian siswa untuk memulai dan mempertahankan usaha. Sebagian siswa masih meragukan kemampuannya mengelola modal, sedangkan sebagian orang tua mengkhawatirkan risiko kerugian, terganggunya kegiatan akademik, dan ketidakmampuan siswa mempertanggungjawabkan dana usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan finansial harus dilengkapi dengan kepercayaan, pendampingan, akses aset, dan dukungan sosial. Komite Sekolah hasil rekonstruksi dapat berperan sebagai jembatan kepercayaan antara sekolah, guru pembimbing, siswa, dan orang tua. Sebelum usaha dijalankan, komite dapat memfasilitasi pertemuan yang menjelaskan tujuan PWMP, pembagian tanggung jawab, penggunaan dana, sistem pencatatan keuangan, jadwal pendampingan, strategi pemasaran, penggunaan lahan, dan penanganan risiko. Transparansi tersebut dapat mengurangi kekhawatiran keluarga karena orang tua memperoleh gambaran mengenai mekanisme pengawasan dan tanggung jawab siswa.

Temuan ini memperlihatkan bahwa hambatan pelaksanaan PWMP bukan semata-mata rendahnya motivasi siswa. Hambatan juga berkaitan dengan belum terbentuknya dukungan sosial dan kelembagaan yang memberikan rasa aman kepada siswa dan keluarga. Lediana et al. (2023) menunjukkan bahwa intensi kewirausahaan pertanian dipengaruhi oleh sikap terhadap usaha, persepsi atas kemampuan diri, pengetahuan, dan dukungan lingkungan. Dukungan komite dan keluarga dapat meningkatkan keyakinan siswa bahwa mereka memiliki legitimasi, sumber daya, dan kemampuan untuk menjalankan usaha. Tikum dan Ahmad (2024) menemukan bahwa program petani muda dapat menghadapi persoalan ketika pelatihan dan bantuan tidak diikuti oleh pendampingan berkelanjutan, akses sumber daya, penguatan pasar, dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa PWMP perlu diposisikan sebagai bagian dari proses pembentukan usaha, bukan sekadar program distribusi bantuan modal.

Mattas et al. (2024) juga menegaskan bahwa program regenerasi petani akan lebih efektif apabila kebijakan dibangun berdasarkan pengalaman dan kebutuhan petani muda. Hambatan petani baru dapat berbeda menurut kondisi keluarga, komoditas, lahan, pasar, dan tahap perkembangan usaha. Oleh karena itu, pendampingan PWMP perlu bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi setiap kelompok siswa. Sinergi antara komite dan sekolah dapat dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap awal, komite membantu membangun pemahaman dan persetujuan keluarga. Pada tahap pelaksanaan, komite mendukung pemantauan, komunikasi, dan

penyelesaian hambatan akses aset. Pada tahap setelah program, komite membantu menghubungkan siswa dengan jaringan pasar, pembiayaan, penyuluhan, dan praktisi usaha. Pola tersebut memungkinkan PWMP berkembang dari proyek pendidikan menjadi rintisan usaha yang mempunyai peluang keberlanjutan setelah siswa lulus.

Namun, dukungan kelembagaan juga perlu diarahkan pada kemandirian. Mulibana dan Tshikovhi (2024) menunjukkan bahwa usaha perdesaan sering bergantung pada dukungan pemerintah dan jaringan eksternal. Dukungan tersebut penting pada tahap awal, tetapi ketergantungan yang berlebihan dapat menghambat kemampuan usaha untuk bertahan secara mandiri. Karena itu, indikator keberhasilan PWMP tidak cukup hanya berupa tersalurkannya modal dan terbentuknya kelompok usaha, tetapi juga kemampuan siswa mengelola biaya, memperoleh pelanggan, mencatat transaksi, mengatasi risiko, dan melanjutkan usaha tanpa bantuan yang terus-menerus. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keterlibatan Komite Sekolah berpotensi meningkatkan efektivitas PWMP melalui penguatan dukungan keluarga dan akses terhadap aset. Meskipun demikian, penelitian ini belum melakukan pengukuran sebelum dan sesudah penerapan model. Oleh karena itu, pernyataan mengenai peningkatan keberhasilan PWMP harus dipahami sebagai proposisi yang didukung oleh temuan kualitatif dan mekanisme konseptual, bukan sebagai hubungan kausal yang telah teruji secara kuantitatif.

Model Rekayasa Sosial dan Dampak Terhadap Perubahan Sosiokultural

Rekonstruksi peran Komite Sekolah pada penelitian ini merupakan bentuk rekayasa sosial yang bersifat partisipatif. Rekayasa sosial tidak dimaknai sebagai upaya memaksakan perubahan kepada keluarga, tetapi sebagai intervensi kelembagaan yang dirancang untuk memperluas informasi, memperbaiki hubungan, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan menciptakan pengalaman baru yang dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap pertanian. Perubahan stigma terhadap profesi petani tidak cukup dilakukan melalui slogan atau penyuluhan satu arah. Orang tua dan masyarakat memerlukan bukti yang dapat diamati bahwa siswa mampu menerapkan teknologi, mengelola produksi, menghasilkan produk berkualitas, menyusun laporan keuangan, memperoleh pasar, dan mempertahankan usaha. Dalam hal ini, pemanfaatan lahan keluarga sebagai lokasi praktik dapat berfungsi sebagai demonstrasi sosial karena proses dan hasilnya dapat diamati langsung oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

Ketika lahan yang sebelumnya tidak produktif berhasil dimanfaatkan untuk hortikultura, peternakan, atau usaha olahan, keluarga memperoleh bukti mengenai penerapan kompetensi siswa. Pengalaman tersebut dapat mengubah hubungan antara orang tua dan anak dari hubungan yang bersifat melarang menjadi hubungan yang mendukung serta mengawasi. Perubahan pada tingkat keluarga selanjutnya berpotensi menyebar melalui interaksi sosial di lingkungan desa. Irawan et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital oleh petani muda dapat menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan ketika teknologi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan kondisi lokal. Dalam konteks SMK PP Negeri Kupang, demonstrasi teknologi seperti irigasi hemat air, pencatatan usaha digital, pengolahan pakan, dan pemasaran daring dapat membantu mengubah citra pertanian dari pekerjaan tradisional menjadi profesi berbasis pengetahuan.

Deže et al. (2023) menjelaskan bahwa inovasi sosial pertanian dapat menghasilkan perubahan ketika teknologi dan praktik ekonomi dihubungkan dengan pengorganisasian sosial yang baru. Oleh karena itu, unsur inovatif dalam model ini bukan hanya penggunaan teknologi, tetapi perubahan hubungan antara siswa, orang tua, sekolah, komite, dunia usaha, dan masyarakat. Espinoza et al. (2024) menemukan bahwa intervensi inovasi sosial di wilayah perdesaan dapat meningkatkan kemampuan rumah tangga mengembangkan kegiatan bernilai tambah dan menghadapi guncangan eksternal. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghubungkan keterampilan siswa dengan aset keluarga dan dukungan kelembagaan. Apabila diterapkan secara konsisten, model tersebut berpotensi menghasilkan dampak yang melampaui pencapaian siswa individual karena dapat memperkuat kapasitas ekonomi rumah tangga dan memperluas contoh usaha pertanian modern di masyarakat.

Secara teoretis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regenerasi petani tidak cukup dijelaskan melalui minat individual generasi muda. Regenerasi terbentuk melalui hubungan antara

kompetensi, aspirasi, legitimasi keluarga, akses terhadap aset, jaringan kelembagaan, dan peluang pasar. Kontribusi konseptual penelitian terletak pada penempatan Komite Sekolah sebagai aktor penghubung yang dapat menyelaraskan pendidikan vokasi pertanian dengan struktur sosial dan aset keluarga. Secara praktis, SMK PP Negeri Kupang dapat menerjemahkan model tersebut ke dalam program kerja komite yang mencakup forum karier pertanian, lokakarya orang tua, pameran usaha siswa, pemetaan aset keluarga, protokol pemanfaatan lahan, dan pendampingan keluarga peserta PWMP. Pelaksanaan program perlu disertai indikator terukur, seperti perubahan persepsi orang tua, jumlah keluarga yang menyediakan lokasi praktik, jumlah usaha siswa yang bertahan, perkembangan omzet, dan proporsi alumni yang bekerja atau berwirausaha di sektor pertanian.

Pada tingkat kebijakan, hasil penelitian mengisyaratkan bahwa dukungan regenerasi petani perlu mengintegrasikan pendidikan, keluarga, aset produktif, pembiayaan, penyuluhan, dan pasar. Program bantuan modal bagi pemuda sebaiknya tidak dilaksanakan secara terpisah dari pendampingan keluarga dan penyediaan akses terhadap lahan. Pemerintah juga dapat mengembangkan pedoman kemitraan bagi sekolah vokasi pertanian agar Komite Sekolah tidak hanya berperan dalam pendanaan, tetapi ikut mendukung transisi siswa menuju pekerjaan dan kewirausahaan. Penelitian ini dilakukan pada satu sekolah sehingga hasilnya merepresentasikan konteks sosial dan kelembagaan SMK PP Negeri Kupang. Rekonstruksi peran Komite Sekolah juga belum diuji melalui implementasi longitudinal atau desain sebelum dan sesudah intervensi. Oleh karena itu, dampaknya terhadap perubahan stigma, akses lahan, keberhasilan usaha PWMP, dan pilihan karier alumni belum dapat dinyatakan sebagai hubungan kausal. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi kontribusi penelitian sebagai studi kasus yang menghasilkan model kelembagaan kontekstual, tetapi menunjukkan perlunya penelitian lanjutan melalui penelitian tindakan, studi komparatif, evaluasi implementasi, dan penelusuran alumni.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komite Sekolah di SMK PP Negeri Kupang masih didominasi oleh fungsi komunikasi administratif, penyelesaian masalah, dan dukungan pendanaan, sehingga belum sepenuhnya menjangkau persoalan substantif dalam regenerasi petani milenial. Hambatan utama yang ditemukan meliputi stigma negatif keluarga terhadap profesi petani, rendahnya kepercayaan orang tua terhadap prospek agribisnis modern, dan terbatasnya akses siswa terhadap lahan keluarga sebagai aset produktif. Berdasarkan temuan tersebut, peran Komite Sekolah direkonstruksi melalui enam dimensi kemitraan, yaitu *parenting*, *communicating*, *volunteering*, *learning at home*, *decision making*, dan *collaborating with community*. Rekonstruksi ini menempatkan Komite Sekolah sebagai agen rekayasa sosial, agen pengasuhan, fasilitator komunikasi, penyelaraset keluarga, dan penghubung jejaring usaha. Model tersebut secara konseptual dapat memperkuat dukungan keluarga, meningkatkan efektivitas PWMP, dan mendukung keberlanjutan regenerasi petani milenial di Nusa Tenggara Timur.

Penelitian selanjutnya disarankan menguji model rekonstruksi ini melalui penelitian tindakan, studi longitudinal, atau evaluasi sebelum dan sesudah implementasi dengan mengukur perubahan persepsi orang tua, akses siswa terhadap lahan, keberlanjutan usaha PWMP, dan pilihan karier alumni. Bagi praktisi sekolah, Komite Sekolah perlu dilibatkan dalam forum karier pertanian, pendampingan keluarga, pemetaan aset, pameran usaha siswa, serta pengembangan jaringan pembiayaan dan pasar. Pada tingkat kebijakan, pemerintah perlu mengintegrasikan pendidikan vokasi pertanian, dukungan keluarga, akses lahan, pendampingan usaha, pembiayaan, dan pemasaran dalam program regenerasi petani, sekaligus memperluas fungsi Komite Sekolah dari pendukung administratif menjadi mitra strategis dalam pengembangan kewirausahaan pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, guru, Komite Sekolah, orang tua siswa, siswa, alumni, dan seluruh pihak di SMK PP Negeri Kupang yang telah memberikan

dukungan, informasi, serta kontribusi selama proses penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada pihak-pihak yang turut mendukung penyusunan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Addi, A., & Raccah, A. (2024). The role of digital capital in parental engagement. *Education and Information Technologies*, 29, 16901–16928. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12455-y>
- Ani, S. W., Darwanto, D. H., Waluyati, L. R., & Masyhuri. (2024). Regeneration of rural rice farmers in Central Java Province. *Environmental Challenges*, 16, Article 100971. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.100971>
- Antony-Newman, M. (2024). Teachers and school leaders' readiness for parental engagement: Critical policy analysis of Canadian standards. *Journal of Teacher Education*, 75(3), 294–308. <https://doi.org/10.1177/00224871231199365>
- Ardyanti, R. K., Purnomo, M., & Kustanti, A. (2024). Driving factors of the rapid development of millennial farmers in Malang Raya. *Universal Journal of Agricultural Research*, 12(1), 159–168. <https://doi.org/10.13189/ujar.2024.120115>
- Ayyıldız, B., Erdal, G., Çiçek, A., & Ayyıldız, M. (2025). Factors influencing rural youth's tendency to stay in agriculture in Türkiye. *Sustainability*, 17(8), Article 3313. <https://doi.org/10.3390/su17083313>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023—Tahap I*.
- Bahaw, P., Baboolal, A., Mack, A. J., & Carter-Rogers, K. (2024). Exposure to entrepreneurship education interventions reveal improvements to vocational entrepreneurial intent: A two-wave longitudinal study. *Discover Education*, 3, Article 145. <https://doi.org/10.1007/s44217-024-00241-4>
- Belando-Montoro, M. R., Fernández-Salineró, C., Virgós-Sánchez, M., & Naranjo-Crespo, M. (2025). The decision-making of students in post-compulsory education: Influence of personal, academic, family, and socioeconomic dimensions on the choice of vocational education and training. *Quality & Quantity*, 59(2), 1739–1766. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02026-1>
- Carbone, A., Carillo, F., Ciaian, P., Sardone, R., Antonioli, F., & Tur Cardona, J. (2024). Does the European Union start-up aid help young farmers to innovate and to join networks? *Agriculture*, 14(10), Article 1772. <https://doi.org/10.3390/agriculture14101772>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Chatzichristos, G., & Hennebry, B. (2023). Social innovation in rural governance: A comparative case study across the marginalised rural EU. *Journal of Rural Studies*, 99, 193–203. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.06.004>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Deže, J., Sudarić, T., & Tolić, S. (2023). Social innovations for the achievement of competitive agriculture and the sustainable development of peripheral rural areas. *Economies*, 11(8), Article 209. <https://doi.org/10.3390/economies11080209>
- Effendy, L., Widyaastuti, N., & Lastri, H. (2022). The millennial farmers' interest in succeeding the family agriculture for hydroponic application in Garut District, West Java, Indonesia. *Universal Journal of Agricultural Research*, 10(3), 266–274. <https://doi.org/10.13189/ujar.2022.100308>
- Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., Van Voorhis, F. L., Martin, C. S., Thomas, B. G., Greenfeld, M. D., Hutchins, D. J., & Williams, K. J. (2019). *School, family, and community partnerships: Your handbook for action* (4th ed.). Corwin.
- Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., Van Voorhis,

- F. L., Martin, C. S., Thomas, B. G., Greenfeld, M. D., Hutchins, D. J., & Williams, K. J. (2019). *School, family, and community partnerships: Your handbook for action* (4th ed.). Corwin.
- Espinoza, M., Rivarola, R., Fort, R., & Fisher, J. (2024). Evaluating the efficacy of social innovation programming at advancing rural development in the context of exogenous shocks. *Sustainability*, 16(13), Article 5664. <https://doi.org/10.3390/su16135664>
- Figurek, A., Morphi, K., & Thrassou, A. (2024). A sustainable risk management model and instruments for young farmers in EU agriculture. *Sustainability*, 16(1), Article 283. <https://doi.org/10.3390/su16010283>
- Girard, P. (2023). From family to markets: How institutional determinants of rural youth transitions have changed in Senegal and Zambia over time. *Journal of Rural Studies*, 101, Article 103040. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103040>
- Griffin, C., Sirimorok, N., Dressler, W. H., Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Faturachmat, F., Muin, A. V. F., Andary, P. M., Batiran, K. B., Rahmat, Rizaldi, M., Toubmourou, T., Suwarso, R., Salim, W., Utomo, A., Akhmad, F., & Clendenning, J. (2024). The persistence of precarity: Youth livelihood struggles and aspirations in the context of truncated agrarian change, South Sulawesi, Indonesia. *Agriculture and Human Values*, 41(1), 293–311. <https://doi.org/10.1007/s10460-023-10489-5>
- Haryati, N., Lasitya, D. S., Nurirrozak, M. Z., Herdianti, D. F., Fibrianingtyas, A., & Hidayat, A. R. T. (2024). Demographics and course choices: Impact on youth farming intention in Indonesia. *International Journal of Adolescence and Youth*, 29(1), Article 2358088. <https://doi.org/10.1080/02673843.2024.2358088>
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, Article 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Irawan, N. C., Irham, Mulyo, J. H., & Suryantini, A. (2023). Unleashing the power of digital farming: Local young farmers' perspectives on sustainable value creation. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 9(2), 316–333. <https://doi.org/10.18196/agraris.v9i2.239>
- Jeanneaux, P., Wendling, E., Desjeux, Y., Enjolras, G., & Latruffe, L. (2025). Structure and determinants of the cost of setting up a farm: The case of young farmers in Central France. *Journal of Rural Studies*, 114, Article 103583. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103583>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*.
- Kusnandar, K., Apriliyani, E. K., Wicaksono, A., & Saville, R. (2024). Local supply chain actor roles in farmer organisation information networks: Empirical findings from two Indonesian farmer organisations. *World Development Perspectives*, 35, Article 100619. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2024.100619>
- Lediana, E., Perdana, T., Deliana, Y., & Sendjaja, T. P. (2023). Sustainable entrepreneurial intention of youth for agriculture start-up: An integrated model. *Sustainability*, 15(3), Article 2326. <https://doi.org/10.3390/su15032326>
- Licciardo, F., Henke, R., Piras, F., & Zanetti, B. (2024). The setting-up measure to support generational renewal in agriculture: The Italian experience. *World*, 5(4), 1130–1147. <https://doi.org/10.3390/world5040057>
- Lone, A. H., & Baba, I. R. (2024). Entrepreneurial intentions of progressive farmers: The influence of innovativeness, risk-taking and proactiveness. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 14(4), 769–787. <https://doi.org/10.1108/JADEE-08-2022-0185>
- Martinez-Yarza, N., Solabarrieta-Eizaguirre, J., & Santibáñez-Gruber, R. (2024). The impact of family involvement on students' social-emotional development: The mediational role of school engagement. *European Journal of Psychology of Education*, 39(4), 4297–4327. <https://doi.org/10.1007/s10212-024-00862-1>
- Mattas, K., Staboulis, C., Tsakiridou, E., Natos, D., Polymeros, A., Baranowski, P., Bojar, W., Parra

- Rivero, O., Ojeda Roldán, Á., Baldi, L., & Arfini, F. (2024). Facilitating generational renewal in rural areas by responding to young farmers' voices: Echoes from the Greek territory. *Journal of Rural Studies*, 112, Article 103480. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103480>
- McKim, C. (2023). Meaningful member-checking: A structured approach to member-checking. *American Journal of Qualitative Research*, 7(2), 41–52. <https://doi.org/10.29333/ajqr/12973>
- Mdoda, L., Loki, O., Zantsi, Y., Mvelase, L., Nontu, Y., & Madende, P. (2026). Youth aspirations and entrepreneurial motivation in agriculture: Insights from smallholder farmers in OR Tambo District, Eastern Cape. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9, Article 1727042. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1727042>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mulibana, L., & Tshikovhi, N. (2024). Rural entrepreneurship and innovation in BRICS economies: Secondary evidence from rural areas in South Africa. *Sustainability*, 16(6), Article 2408. <https://doi.org/10.3390/su16062408>
- Nandi, R., Pratheepa, C. M., Nedumaran, S., Rao, N., & Rengalakshmi, R. (2022). Farm parent and youth aspirations on the generational succession of farming: Evidence from South India. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, Article 804581. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.804581>
- Ngadi, Zaelany, A. A., Latifa, A., Harfina, D., Asiati, D., Setiawan, B., Ibnu, F., Triyono, & Rajagukguk, Z. (2023). Challenge of agriculture development in Indonesia: Rural youth mobility and aging workers in agriculture sector. *Sustainability*, 15(2), Article 922. <https://doi.org/10.3390/su15020922>
- Nguyen, G. N., & Nguyen, T. K. (2024). Entrepreneurial passion of business and technical students: The roles of subjective norms, entrepreneurial education, entrepreneurial self-efficacy, and risk propensity. *The International Journal of Management Education*, 22(3), Article 101012. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2024.101012>
- Okello, D., Mshenga, P., Saidi, M., Juma, F., Maria, S., Egeru, A., & Gogo, E. (2024). Entrepreneurship education in East, West and North Africa higher education institutions: Mapping agripreneurship curriculum and lecturers' competencies. *Discover Education*, 3, Article 100. <https://doi.org/10.1007/s44217-024-00204-9>
- Parry, K., Cooper, B., Bjornlund, H., Crase, L., Moyo, M., & Dube, T. (2025). Institutions influencing plot access and intergenerational land transfer: Policy insights from a smallholder irrigation scheme in Zimbabwe. *Journal of Rural Studies*, 114, Article 103576. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103576>
- Prasetyaningrum, D. I., Ruminar, H., & Irwandi, P. (2022). The perception and interest of career choices in agriculture: Case of agroecotechnology and agribusiness students. *Habitat*, 33(2), 186–200. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2022.033.2.19>
- Putranto, F. G. F., Natalia, C., & Pitriyani, N. K. D. (2024). Closing the gap between education and labor market requirement: Do vocational education matter? *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(3), 181–191. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.614>
- Qonita, R. R. A., Masyhuri, Jamhari, & Perwitasari, H. (2025). Social environmental support in encouraging entrepreneurial behavior of millennial farmers in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia: An effort to realize sustainable agriculture. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 40(1), 64–83. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v40i1.92724>
- Rahaman, W. A., Mohammed, I., Turkson, F. E., & Baffour, P. T. (2023). Influences of parental occupation on children's occupational choices. *International Journal of Social Economics*, 50(12), 1735–1755. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2022-0705>
- SMK-PP Negeri Kupang. (2020). *Rencana strategis SMK-PP Negeri Kupang 2020–2024*.
- Steiner, A., Calò, F., & Shucksmith, M. (2023). Rurality and social innovation processes and outcomes: A realist evaluation of rural social enterprise activities. *Journal of Rural Studies*,

- 99, 284–292. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.04.006>
- Tikum, K., & Ahmad, M. M. (2024). Challenges of making a new farmer: A case study of Thailand's Young Smart Farmer program. *Development Studies Research*, 11(1), Article 2414014. <https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2414014>
- Touch, V., Tan, D. K. Y., Cook, B. R., Liu, D. L., Cross, R., Tran, T. A., Utomo, A., Yous, S., Grunbuhel, C., & Cowie, A. (2024). Smallholder farmers' challenges and opportunities: Implications for agricultural production, environment and food security. *Journal of Environmental Management*, 370, Article 122536. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122536>
- Wang, E., Li, S., Jiang, Y., & Zhang, J. (2024). Longitudinal effect of career-related parental support on vocational college students' proactive career behavior: A moderated mediation model. *Current Psychology*, 43(13), 11422–11434. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-05268-8>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications